

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Kepemimpinan Kepala Madrasah**

###### **a. Pengertian Kepemimpinan Kepala Madrasah**

Definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Hoy dan Miskol, sebagaimana dikutip Purwanto, mengemukakan bahwa definisi kepemimpinan hampir sebanyak orang yang meneliti dan mendefinisikannya.<sup>1</sup>

Kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing sesuatu kelompok sedemikian rupa, sehingga tercapailah tujuan dari kelompok itu.<sup>2</sup>

Kepala madrasah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar.<sup>3</sup> Pemimpin yang dalam bahasa Inggris disebut *leader* dari akar kata *to lead* yang terkandung arti yang saling erat berhubungan: bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, berbuat paling dulu, memelopori, mengarahkan pikiran-pendapat tindakan orang lain,

---

<sup>1</sup> Ngelim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 263.

<sup>2</sup> N.A. Ametembun, *Kepemimpinan Pendidikan* (Malang: IKIP Malang, 1975), 1-2.

<sup>3</sup> Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999), 81.

membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan definisi kepemimpinan menurut para ahli.

Kepala madrasah terdiri dari dua kata yaitu “kepala” dan “madrasah”. Kata “kepala” dapat diartikan “ketua” atau “pemimpin” dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedang “madrasah (sekolah)” adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran.<sup>4</sup> Menurut Wahjosumidjo, secara sederhana kepala madrasah (sekolah) dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah (sekolah) dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.<sup>5</sup>

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kepala madrasah (sekolah) merupakan seseorang yang diberi tugas oleh bawahannya untuk memimpin suatu madrasah dimana di dalam madrasah diselenggarakan proses belajar mengajar. Di dalam menjalankan tugasnya kepala madrasah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada. Hal ini bertujuan agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka. Selain itu seorang kepala madrasah juga bertanggung jawab tercapainya

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1988), 420.

<sup>5</sup> Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya* 82.

pendidikan. Ini dilakukan dengan menggerakkan bawahan ke arah tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

#### **b. Peran Kepala Madrasah**

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan dengan sebaik mungkin, termasuk di dalamnya sebagai pemimpin pengajar.<sup>6</sup> Harapan yang segera muncul dari para guru, siswa, staf administrasi, pemerintah dan masyarakat adalah agar kepala sekolah dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan seefektif mungkin untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang diemban dalam mengoptimalkan sekolah., selain itu juga memberikan perhatian kepada pengembangan individu dan organisasi.

Peran seorang pemimpin, akan sangat menentukan kemana dan akan menjadi apa organisasi yang dipimpinnya. Sehingga dengan kehadiran seorang pemimpin akan membuat organisasi menjadi satu kesatuan yang memiliki kekuatan untuk berkembang dan tumbuh menjadi lebih besar. Begitu juga dengan kepala madrasah sebagai pemimpin lembaga pendidikan formal mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan tenaga kependidikan.

Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut tak lepas dari peran Kepala Madrasah sebagai pengelola dalam lembaga

---

<sup>6</sup> Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (Surabaya: Elkaf, 2006), 133.

pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan peran Kepala Madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sini adalah usaha-usaha yang dilakukan Kepala Madrasah untuk mencapai kemajuan dan kesempurnaan pendidikan yang dipercayakan kepadanya. Adapun peran Kepala Madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu Kepala Madrasah sebagai Administrator dan Kepala Madrasah sebagai Supervisor.<sup>7</sup>

#### 1) Kepala Madrasah sebagai Administrator

Kepala Madrasah sebagai administrator pendidikan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Madrasahnyanya. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Kepala Madrasah hendaknya memahami, menguasai dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan fungsinya sebagai administrator pendidikan.

Adapun dalam setiap kegiatan administrasi ini, di dalamnya mengandung fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan, kepegawaiaan dan pembiayaan. Oleh karena itu, Kepala Madrasah sebagai administrator hendaknya mampu mengaplikasikan fungsi-fungsi tersebut kedalam pengelolaan Madrasah yang dipimpinnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dirawat, Busro Lamberi, dkk. *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), 80

<sup>8</sup> M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), 106

Sehubungan dengan hal diatas, maka tugas Kepala Madrasah dalam bidang administrasi ini dapat digolongkan menjadi 6 bidang manajemen, sebagai berikut :

- a) Pengelolaan pengajaran
- b) Pengelolaan kepegawaian
- c) Pengelolaan kemuridan
- d) Pengelolaan gedung dan halaman
- e) Pengelolaan keuangan
- f) Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat.<sup>9</sup>

## 2) Kepala Madrasah sebagai Supervisor

Kepala Madrasah sebagai orang yang bertanggung jawab di Madrasah mempunyai kewajiban untuk menjalankan Madrasahnyanya, terutama membantu perkembangan anggota-anggota stafnya dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasahnyanya.

Untuk mengetahui tanggungjawab tersebut, sebelumnya perlu diketahui lebih dahulu pengertian supervisi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs.H.M.Daryanto, bahwasanya :

“Supervisi adalah aktivitas menentukan kondisi atau syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan.<sup>10</sup>

Melihat definisi diatas, dapat dikatakan bahwasanya Kepala Madrasah sebagai supervisor harus dapat meneliti, mencari dan menentukan syarat-syarat mana yang telah ada dan mencukupi mana yang belum ada atau kurang yang perlu diusahakan dan dipenuhi. Disamping itu, Kepala Madrasah juga harus berusaha agar semua

<sup>9</sup> Dirawat, Busro Lamberi, dkk, *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*, 80.

<sup>10</sup> H.M Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta,), 84.

potensi yang ada di Madrasahny, baik potensi yang ada pada unsur manusia maupun yang ada pada alat, perlengkapan, keuangan dan sebagainya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.<sup>11</sup>

Adapun rumusan-rumusan tentang tugas-tugas Kepala Madrasah sebagai supervisor, sebagaimana yang di kemukakan oleh M.Rifai adalah sebagai berikut :

- a) Membantu stafnya menyusun program
- b) Membantu stafnya mempertinggi kecakapan dan keterampilan mengajar.
- c) Mengadakan evaluasi secara kontinyu tentang kesanggupan stafnya dan tentang kemajuan program pendidikan pada umumnya.<sup>12</sup>

#### **c. Teknik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Teknik yang dapat dipakai dalam kegiatan meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu

##### **1) Teknik langsung**

Teknik langsung dapat dillaksnakan dengan pertemuan dalam rapat atau kunjungan pribadi, melalui surat kepada orang tua siswa dan melalui media masa.

##### **2) Teknik tidak langsung**

Teknik tidak langsung yaitu kegiatan yg secara tidak sengaja dilakukan oleh pelaku atau pembawa pesan akan tetapi mempunyai nilai positif untuk kepentingan hubungan sekolah dan masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Rohani HM dan Abu Ahmadi, *Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, , 1991), 74

<sup>12</sup> M. Moh Rifai *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Jemmars, 1986), 161.

#### **d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepemimpinan**

Dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, seseorang yang menduduki profesi sebagai pemimpin pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mewarnai pola kepemimpinannya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor legal yang berpengaruh dalam kependidikan.
2. Kondisi sosial ekonomi dan konsep-konsep pendidikan sebagai pengaruh dalam kepemimpinan.
3. Hakekat dan atau ciri sekolah sebagai pengaruh kepemimpinan.
4. Kepribadian pemimpin pendidikan dan latihan-latihan sebagai faktor yang mempengaruhi kepemimpinan.
5. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam teori pendidikan sebagai faktor yang mempengaruhi kepemimpinan.<sup>14</sup>

Disamping itu pula, M. Ngalim Purwanto juga mengemukakan adanya faktor-faktor yang pada umumnya sangat dominan mempengaruhi perilaku seorang pemimpin, diantaranya:

1. Keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin untuk menjalankan kepemimpinannya.
2. Jenis pekerjaan atau lembaga tempat pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya.
3. Sifat-sifat kepribadian pemimpin.
4. Sifat-sifat kepribadian pengikut atau kelompok yang dipimpinnya.
5. Sangsi-sangsi yang ada di tangan pemimpin.<sup>15</sup>

Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan satu-persatu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan pendidikan, sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Soejipto dan Rafli, *Kosasi Profesi Keguruan Cet 1* (Jakarta: Remaja Rosda Karya 1999) 196-197.

<sup>14</sup> Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1984), 16.

<sup>15</sup> M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, 59.

- 1) Keahlian dan Pengetahuan yang dimiliki oleh pemimpin untuk menjalankan kepemimpinannya.

Yang termasuk dalam hal ini adalah latar belakang pendidikan atau ijazah yang dimiliki, apakah sudah sesuai dengan tugas-tugas kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya; pengalaman kerja sebagai pemimpin, apakah sudah mendorong dia untuk berusaha memperbaiki dan mengembangkan kecakapan dan ketrampilannya dalam memimpin. Seorang pemimpin yang ideal tidak akan merasa puas hanya dengan mengandalkan latar belakang pendidikan dan pengalamannya saja, tanpa selalu berusaha mengembangkan diri dengan menambah pengetahuan.

- 2) Jenis pekerjaan atau lembaga tempat pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya.

Tiap organisasi atau lembaga yang tidak sejenis memiliki tujuan yang berbeda dan menuntut cara-cara pencapaian tujuan yang tidak sama. Seorang yang sedang memimpin anak buah dalam kapal yang sedang tenggelam, tidak akan sama dengan perilaku dan sikap seorang guru yang sedang memimpin diskusi dalam kelas. Oleh karena itu, tiap jenis lembaga memerlukan perilaku dan sikap kepemimpinan yang berbeda pula.

- 3) Sifat-sifat kepribadian pemimpin.

Secara psikologis, manusia mempunyai sifat, watak dan kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang selalu dapat bersikap



dan bertindak keras dan tegas, tetapi adapula yang lemah dan kurang berani. Dengan adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing pemimpin, meskipun beberapa dari mereka memiliki latar belakang pendidikan sama dan disertai tugas memimpin lembaga yang sejenis, tetapi karena adanya perbedaan kepribadian diantara mereka, maka akan timbul pula perilaku dan sikap yang berbeda dalam menjalankan kepemimpinannya.

4) Sifat-sifat kepribadian pengikut atau kelompok yang dipimpinnya.

Perbedaan sifat-sifat individu dan sifat-sifat kelompok sebagai anak buah atau pengikut seorang pemimpin akan mempengaruhi bagaimana seyogyanya perilaku dan sikap pemimpin itu dalam menjalankan kepemimpinannya.

Tentang sifat-sifat kepengikutan, M. Ngalim Purwanto mengemukakan ada lima macam kepengikutan, yaitu:

- a) Kepengikutan karena naluri dan nafsu.
- b) Kepengikutan karena tradisi dan adat.
- c) Kepengikutan karena agama dan budi nurani.
- d) Kepengikutan karena peraturan hukum.<sup>16</sup>

Agar para anggota kelompok dapat mematuhi dan mentaati perintah serta menjalankan tugasnya dengan ikhlas dan sabar serta tidak merasa tertekan, maka sangat penting bagi seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya untuk mengetahui dan mempelajari sifat atau tipe kepengikutannya yang ada pada anggota kelompoknya.

---

<sup>16</sup> Ibid., 60.

5) Sangsi-sangsi yang ada di tangan pemimpin.

Kekuatan-kekuatan yang ada dibelakang pemimpin menentukan sikap dan tingkah lakunya. Sikap atau reaksi anggota kelompok dari seorang pemimpin yang mempunyai wewenang penuh akan lain jika dibandingkan dengan seorang pemimpin yang kurang atau tidak berwenang. Seorang guru yang baru dibentuk sebagai pejabat pimpinan Madrasah akan bertindak dan berperilaku lain dengan seorang Kepala Madrasah yang telah resmi diangkat dengan surat keputusan dari atasan. Hal ini dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kekuasaan dan atau perangkat perundang-undangan menentukan tinggi rendahnya kekuatan atau sangsi seorang pemimpin yang diangkat oleh penguasa atau berdasarkan perundangan tersebut.

## 2. Partisipasi Masyarakat

### a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi mengandung arti keikutsertaan. Menurut Kamus Besar Indonesia, partisipasi adalah “sejumlah orang yang turut berperan dalam suatu kegiatan; keikutsertaan dan peran serta”.<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa unsur penting yang tercakup dalam pengertian partisipasi, diantaranya: *Pertama*, dalam partisipasi yang ditelaah bukan hanya keikutsertaan secara fisik tetapi juga pikiran dan perasaan (mental dan emosional). *Kedua*, partisipasi dapat digunakan untuk memotivasi

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1997) 732.

orang-orang yang menyumbangkan kemampuannya kepada situasi kelompok sehingga daya kemampuan berfikir serta inisiatifnya dapat timbul dan diarahkan kepada tujuan-tujuan kelompok. *Ketiga*, dalam partisipasi mengandung pengertian orang untuk ikut serta dan bertanggungjawab dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi rasa keterlibatan psikologis individu dengan tugas yang diberikan kepadanya, semakin tinggi pula rasa tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas tersebut.

Menurut nazril shaleh ahmad, masyarakat diartikan:

“Sekumpulan orang yang saling tolong menolong dalam kehidupannya sesuai dengan sistem yang menentukan berbagai hubungan mereka dengan bagian lainnya dalam rangka merealisasi tujuan-tujuan tertentu dan menghubungkan mereka dengan sebagian lainnya dengan beberapa ikatan spiritual maupun materil”.<sup>18</sup>

Partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional sudah cukup jelas ditegaskan dalam,

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 (UU Sisdiknas), pada bab XV pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta persorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.<sup>19</sup>

Kontjaningrat dalam bukunya mulyasa menggolongkan partisipasi masyarakat kedalam tipologinya, ialah partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Partisipasi kuantitatif menunjuk pada frekuensi

<sup>18</sup> Nazril Shaleh Ahmad, *Pendidikan dan Masyarakat* (Yogyakarta: Bina Usaha, 1989), 44.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (Bandung: Fokus Media, 2010), 28.

keikutsertaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan, sedangkan partisipasi kualitatif menunjuk kepada tingkat dan derajatnya.<sup>20</sup>

Partisipasi dalam pendidikan bisa juga dilakukan secara individu maupun secara kelompok sebagaimana yang dikemukakan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 54 dinyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.<sup>21</sup>

Mulyasa juga menuliskan partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari cakupannya. Dalam hal ini partisipasi masyarakat juga dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Partisipasi secara sempit yaitu keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses perubahan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan arti pembangunan sendiri.
- b. Partisipasi secara luas yaitu masyarakat menentukan tujuan, strategi, dan perwakilannya dalam pelaksanaan kebijakan dan pembangunan.
- c. Partisipasi sebagai lawan dari kegiatan politik yaitu sebagai upaya mendidik golongan-golongan masyarakat yang berbeda-beda

---

<sup>20</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 170.

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 35.

kepentingannya untuk mengajukan secara rasional keinginannya dan menerima secara suarela keputusan pembangunan.<sup>22</sup>

Pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai hak atau kewajiban untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memberikan bantuan dan mendukung jalannya program-program pendidikan yang ada serta mensukseskan jalannya program-program pendidikan supaya apa yang diharapkan dapat terwujud.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pendidikan, karena tanpa adanya masyarakat pendidikan tidak akan berjalan. Peran serta masyarakat dapat diberikan dengan berbagai cara dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi.

Ada tujuh tingkatan peran serta masyarakat (dirinci dari tingkat partisipasi masyarakat terendah ke tinggi), yaitu:

- 1) Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Jenis PSM ini adalah jenis yang paling umum (ironisnya dunia pendidikan kita). Pada tingkatan ini masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka.
- 2) Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada PSM ini masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang atau tenaga.

---

<sup>22</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, 171.

- 3) Peran serta secara pasif. Masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah (komite sekolah), misalnya komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhi.
- 4) Peran serta melalui adanya konstitusi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya.
- 5) Peran serta dalam pelayanan. Orang tua/masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orang tua ikut membantu sekolah ketika ada studi tur, pramuka, kegiatan keagamaan, dan sebagainya.
- 6) Peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Misalnya sekolah meminta orang tua/masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi, berpartisipasi mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah dapat menampungnya.
- 7) Peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua/masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).

Dengan demikian pengertian partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau keterlibatannya masyarakat terhadap suatu kegiatan atau organisasi sosial, sesuai dengan tingkat kemampuan dan kewajiban untuk mewujudkan keinginan dan kepentingan bersama, yaitu

keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di MTs PSM Pace Nganjuk.

Tujuan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, agar dengan partisipasi masyarakat tersebut madrasah sebagai lembaga pendidikan islam dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat.

#### **b. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat**

Pada dasarnya penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah mengupayakan adanya partisipasi aktif dari masyarakat terutama orang tua siswa terhadap lembaga madrasah. Dalam hal ini masyarakat dapat membantu dan bekerja sama dengan madrasah sehingga program madrasah dapat berjalan lancar dan lulusan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pendidikan menurut holil, yaitu:

- 1) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- 2) Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkasa.

- 3) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program
- 4) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.<sup>23</sup>

Bentuk-bentuk Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat dalam bentuk jenis keterlibatannya yang dapat dibedakan menjadi lima bagian yaitu:

- 1) Partisipasi buah pikiran
- 2) Partisipasi tenaga
- 3) Partisipasi harta benda
- 4) Partisipasi keterampilan atau kemahiran
- 5) Partisipasi sosial

Partisipasi ditinjau dari segi tujuan, meliputi:

- 1) Partisipasi berupa probilisasi, yaitu partisipasi yang bertujuan hanya untuk mendukung kebijaksanaan yang telah ditetapkan dari atas.
- 2) Partisipasi saling menunjang, yakni partisipasi yang bertujuan tidak hanya mendukung kebijaksanaan yang telah ditetapkan akan tetapi juga mengoreksi serta mengisi kekurangan kebijakan tersebut.

Partisipasi ditinjau dari segi pengelolaan, meliputi:

- 1) Partisipasi pada tahap perencanaan

---

<sup>23</sup> Holil Soelaiman, *Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 1980), 10.



2) Partisipasi pada tahap pelaksanaan

3) Partisipasi pada tahap evaluasi

Partisipasi ditinjau dari segi frekuensinya, meliputi:

1) Partisipasi yang hanya dapat dilakukan secara periodik

2) Partisipasi yang dilakukan tidak secara periodik

Partisipasi ditinjau dari segi langsung dan tidak langsung, meliputi:

1) Partisipasi langsung yaitu partisipasi yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan.

2) Partisipasi tidak langsung yaitu dapat dilakukan dengan dua cara:

Pertama, orang atau warga masyarakat membentuk suatu kelompok, kemudian didalam kelompok tersebut orang atau warga masyarakat mengungkapkan partisipasinya. Kedua, orang-orang atau kelompok tertentu mengungkapkan masalah, kemudian kelompok mengolahnya.

Cara berpartisipasi antara lain:

1) Ikut dalam pertemuan

2) Datang kesekolah

3) Lewat surat

4) Lewat telepon

5) Ikut dalam kegiatan sekolah seperti milad madrasah, bakti sosial dan lain-lain.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 189.

### 3. Hubungan masyarakat

#### a. Pengertian Humas

Pada dasarnya, humas (hubungan masyarakat) merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang non komersial. Mulai dari yayasan, perguruan tinggi, dinas militer sampai dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Kebutuhan dan kehadiran humas tidak dapat dicegah, terlepas dari suka atau tidak suka, karena humas merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif. Arti penting humas sebagai sumber informasi semakin kita rasakan pada era globalisasi seperti saat ini.

Humas merupakan terjemahan bebas dari istilah *Publik Relation* (PR), kedua istilah ini dipakai secara bergantian, yang terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara lembaga atau organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya. Setiap orang pada dasarnya pernah mengenal dan mempraktekkan fungsi humas, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan orang-orang lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Istilah dasar ini seringkali tidak dipahami oleh semua orang. Untuk menghindari salah pengertian, dapat dilihat makna baku atau definisi dari istilah Humas tersebut dari kamus induk yang sering dijadikan acuan bagi kalangan praktisi Humas.

Menurut definisi kamus terbitan *Institute of Public Relation* (IPR), yaitu sebuah lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa, terbitan November 1987,

”Humas adalah keseluruhan upaya yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya”.

Jadi Humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang terorganisasi sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Kegiatan Humas sama sekali tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau mendadak. Tujuan Humas itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa niat baik dan kiprah organisasi yang bersangkutan senantiasa dimengerti oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan (khalayak atau publiknya).

#### **b. Hubungan dan Peran Antara Masyarakat dan Sekolah**

Hubungan atau komunikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita dari seseorang ke orang lain. Sedangkan mengenai Humas (*Hubungan Masyarakat*) sampai sekarang masih banyak orang mempunyai penafsiran yang berbeda, kebanyakan dari mereka mendefinisikannya sesuai dengan cara mereka mempraktekkannya.

“Lembaga Hubungan Masyarakat Malaysia (IPRM) menjelaskan bahwa hubungan masyarakat adalah suatu

usaha yang disengaja, direncanakan dan diteruskan untuk menjalin dan membina saling pengertian diantara organisasi dan masyarakatnya.”<sup>25</sup>

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat mempunyai peran yang cukup besar bagi perkembangan organisasi di masa yang akan datang. Begitu juga dengan sekolah, suatu sekolah bisa dikatakan sukses jika mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Karena bagaimanapun juga pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah dan masyarakat.

Masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah mempunyai peran cukup besar terhadap berlangsungnya aktivitas yang menyangkut masalah pendidikan. Suatu kenyataan bahwa masyarakat dikatakan maju karena pendidikan yang maju, dan sebaliknya masyarakat yang kurang kurang memperhatikan pembinaan pendidikannya, akan tetap terbelakang. oleh sebab itulah, dengan segala komponen yang ada di dalamnya, sudah seharusnya masyarakat terlibat dalam dunia pendidikan.

Muhammad Noor Syam dalam bukunya *Filsafat Pendidikan dan Dasar Pendidikan Pancasila* mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat sebagai totalitas memiliki physical environmen (lingkungan alamiah, benda-benda, iklim, kekayaan material) dan social environment (manusia, kebudayaan, dan nilai-nilai agama), sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Adnan, Hamdan dan Hafied Cangara, . *Prinsip-Prinsip Hubungan Masyarakat*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1996)

<sup>26</sup> Muhammad Noor Syam , *Filsafat Pendidikan dan Dasar Pendidikan Pancasila*, (Bandung: pustaka setia, 1996), 197.

Hasbullah dalam bukunya dasar-dasar ilmu kependidikan menyebutkan bahwa peran masyarakat terhadap (sekolah) adalah sebagai berikut;

- 1) Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah.
- 2) Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat.
- 3) Masyarakatlah yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung- gedung sekolah, perpustakaan, aula dll.
- 4) Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Sekolah bisa melibatkan masyarakat yang memiliki keahlian khusus seperti petani, pedagang, polisi, dokter dll.
- 5) Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. selain buku-buku pelajaran, masyarakat juga memberikan bahan pelajaran yang banyak sekali seperti industri, perumahan, transport, perkebunan, pertambangan dll.<sup>27</sup>

Dari beberapa uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa pada hakekatnya masyarakat mempunyai peran yang cukup besar bagi pendidikan. Realita dilapangan membuktikan bahwa perkembangan dalam masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat maka pendidikan harus bisa mengerahkan segala daya upayanya untuk mengikuti perkembangan

---

<sup>27</sup> Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan..* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). 100.

masyarakat tersebut kalau tidak mau ketinggalan zaman. Selain itu perlu meningkatkan kerja sama yang baik dengan masyarakatnya sehingga keberhasilan akan diraih sesuai dengan harapan.

Layanan Riset Pendidikan dan Asosiasi Nasional Kepala pendidikan Dasar di Alexandria merumuskan beberapa teknik meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam menyelenggarakan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Layanan masyarakat. Dalam hal ini lembaga pendidikan harus mempelajari kebutuhan masyarakat dan berusaha memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat.
- 2) Program Pemanfaatan Alumni Sekolah. Lembaga bisa melibatkan alumni-alumni yang sukses sebagai pembicara dalam seminar-seminar atau kegiatan lain untuk meningkatkan semangat siswa-siswanya.
- 3) Masyarakat sebagai Model. Masyarakat sebagai model siswa di sekolah, terutama masyarakat yang telah berhasil dalam kehidupannya.
- 4) Open House. Lembaga pendidikan secara terbuka bersedia diobservasi oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui penyelenggaraan pendidikan di lembaga tersebut.
- 5) Pemberian kesempatan kepada masyarakat. Lembaga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.

- 6) Masyarakat sebagai sumber informasi. Lembaga selalu mencari isu-isu dalam masyarakat guna mengembangkan lembaganya.
- 7) Diskusi panel. Siswa, orang tua, staf dan pekerja mengadakan pertemuan untuk menindak lanjuti kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat.
- 8) Memberdayakan orang-orang kunci. Lembaga juga bisa memberdayakan orang-orang kunci dalam masyarakat seperti kyai, sesepuh desa, pengusaha sukses, ketua RT, RW dan lain-lain untuk diikutkan dalam memikirkan program pengembangan sekolah.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut H.M Daryanto sarana-sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai berikut;

- 1) Sistem visual yaitu sistem komunikasi dengan menggunakan alat-alat yang dapat dilihat dengan panca indra seperti majalah, surat kabar, poster, gambar, dan lain sebagainya.
- 2) Sistem audio yaitu dengan menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan indra pendengaran seperti rapat-rapat, kontak dengan telepon, telegram dan lain sebagainya.
- 3) Sistem audio visual yaitu sistem komunikasi dengan menggunakan alat-alat indra penglihatan dan pendengaran seperti televisi, film dan lain sebagainya .<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> H Burhanuddin, dkk. *Manajemen Pendidikan. Analisis Substantif dan Aplikasinya Dalam Institusi Pendidikan..* (Malang: UNM, 2003). 127-128.

<sup>29</sup> Daryanto, HM. *Administrasi Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 76.

### c. Peran Sekolah Terhadap Masyarakat

Organisasi pendidikan (*sekolah*) merupakan suatu sistem yang terbuka. Sebagai sistem terbuka, sekolah pasti akan mengadakan hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Sekolah yang maju pasti akan banyak mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga lain di luar sekolah, contohnya dalam hal beasiswa, PHBI, praktek ketenagakerjaan dan masih banyak lagi yang lain.

Menurut Kindered Leslic dalam bukunya Mulyono hubungan sekolah dengan masyarakat (*school public relation*) bahwa,

Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengertian anggota masyarakat tentang kebutuhan dari praktik pendidikan serta mendorong minat dan kerja sama para anggota masyarakat dalam rangka memperbaiki sekolah.<sup>30</sup>

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat dan sekolah mempunyai keterkaitan dan saling berpengaruh satu sama lain. Lembaga yang berkualitas baik akan terus berusaha memfungsikan dan mengatur manajemen humasnya dengan melakukan hubungan dengan lembaga-lembaga lain diluar sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikannya.

Adapun tujuan dilakukannya hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pembinaan pengertian masyarakat tetang semua aspek atau bidang pelaksanaan program pendidikan disekolah.

---

<sup>30</sup> Mulyono, *Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 208.



Pemahaman program yang dilakukan disekolah sangat penting diketahui orang tua dan masyarakat dengan tujuan agar mereka termotivasi untuk bisa memberikan bantuan yang maksimal terhadap terlaksananya program-program sekolah tersebut.

- 2) Menampung harapan-harapan tentang tujuan pendidikan disekolah. Tujuan sekolah perlu diketahui dan disepakati bersama oleh pihak sekolah dan masyarakat melalui pertemuan rutin antara sekolah dengan masyarakat atau orang tua murid.
- 3) Memperoleh partisipasi, dukungan dan bantuan secara konkrit dari masyarakat baik berupa tenaga, sarana prasarana maupun dana demi kelancaran dan tercapainya tujuan pendidikan.
- 4) Mengikutsertakan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihapai sekolah.<sup>31</sup>

Sutisna mengemukakan maksud hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu:

- 1) Untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah.
- 2) Untuk menilai program sekolah.
- 3) Untuk mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didik
- 4) Untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dalam era pembangunan

---

<sup>31</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 65-67.

- 5) Untuk membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah
- 6) Untuk memberitahukan masyarakat tentang pekerjaan sekolah
- 7) Untuk mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.<sup>32</sup>

Ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup sekolah, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan, memperlancar proses belajar mengajar, memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah.<sup>33</sup>

Dari uraian tersebut diatas, jelas terlihat bahwa lembaga pendidikan mempunyai peran cukup besar terhadap masyarakat dan juga sebaliknya masyarakat juga mempunyai peran cukup besar bagi penyelenggaraan pendidikan. Dengan memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah diharapkan tercapainya tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu meningkatnya kinerja sekolah dan terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara produktif, efektif dan efisien, sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas.

#### **d. Manfaat Hubungan Timbal Balik Antara Masyarakat Dan Sekolah**

Hubungan madrasah dengan masyarakat merupakan hubungan yang bersifat timbal balik yaitu saling memberi dan menerima, juga bersifat saling menguntungkan.

---

<sup>32</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 164.

<sup>33</sup> Mulyono, *Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2008), 211.

Made Pidarta menyebutkan secara rinci manfaat hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat adalah sebagai berikut ;<sup>34</sup>

**Tabel 2.1 Manfaat Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat**

| <b>Bagi Lembaga Pendidikan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Bagi Masyarakat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbesar dorongan mawas diri</li> <li>2. Mempermudah memperbaiki pendidikan.</li> <li>3. Memperbesar usaha meningkatkan profesi mengajar.</li> <li>4. Konsep mtentang guru/dosen menjadi benar.</li> <li>5. Mendapatkan koreksi dari kelompok masyarakat.</li> <li>6. Mendapatkan dukungan moral dari masyarakat.</li> <li>7. Memudahkan meminta bantuan dan material dari masyarakat.</li> <li>8. Memudahkan pemakaian media pendidikan di masyarakat.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tahu hal-hal persekolahan dan inovasinya</li> <li>3. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan</li> <li>4. Menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan</li> <li>5. Melakukan usul-usul terhadap lembaga pendidikan.</li> </ol> |

Dengan adanya hubungan timbal balik antara antara masyarakat dan sekolah akan saling bermanfaat satu sama yang lainnya. Masyarakat semakin senang dan rasa memilikinya semakin besar, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap madrasah dapat terbina secara lebih baik.

Dari uraian tersebut diatas, jelas terlihat bahwa pada hakekatnya hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangatlah bersifat korelatif, saling mendukung satu sama lain. Lembaga maju karena adanya dukungan dari masyarakat dan masyarakat bisa maju karena adanya pendidikan yang memadai. Karena bagaimanapun juga setiap peserta didik pasti akan terjun ke masyarakat.

<sup>34</sup> Made Pidarta. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988). 361.

Oleh sebab itulah, peran aktif masyarakat dalam memajukan pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan masa depan. Dengan demikian, tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemerataan pendidikan dengan sistem Wajib Belajar 9 Tahun) akan berhasil dan menghasilkan output yang bermutu dan siap terjun di masyarakat dengan berbagai tantangan yang ada di dalamnya.